



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.806, 2015

KEMENKUMHAM. Target Kinerja.

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
TARGET KINERJA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum dan hak asasi manusia serta untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah atau sedang dilaksanakan, perlu menetapkan target kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Target Kinerja adalah rencana atau strategi yang diterapkan untuk melakukan percepatan suatu kegiatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.**
- 2. Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Target Kinerja yang selanjutnya disebut Tim Pemantauan dan Evaluasi adalah tim yang dibentuk untuk memantau dan melakukan evaluasi pelaksanaan Target Kinerja.**
- 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.**
- 4. Unit Eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Unit eselon I adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.**
- 5. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.**

Pasal 2

Target Kinerja bertujuan untuk:

- a. mempercepat pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;**
- b. meningkatkan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka peningkatan kualitas pembentukan dan pelayanan hukum serta pemenuhan/pemajuan hak asasi manusia kepada masyarakat;**
- c. meningkatkan integritas aparatur hukum dan hak asasi manusia;**
- d. meningkatkan koordinasi antarlembaga penegak hukum; dan**
- e. mendorong terwujudnya penguatan perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat.**

Pasal 3

- (1) Unit Eselon I dan Kantor Wilayah wajib melaksanakan Target Kinerja.**
- (2) Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.**

Pasal 4

Pelaksanaan Target Kinerja dikoordinasikan oleh Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah di lingkungan kerja masing-masing.

Pasal 5

- (1) Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Target Kinerja kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.**
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala, pada:**
 - a. bulan ke enam (B06), paling lambat tanggal 5 Juli Tahun 2015;**
 - b. bulan ke sembilan (B09), paling lambat tanggal 5 Oktober Tahun 2015; dan**
 - c. bulan ke dua belas (B12), paling lambat tanggal 5 Januari 2016.**

Pasal 6

- (1) Unit Eselon I dan Kantor Wilayah yang telah melaksanakan Target Kinerja sesuai target capaian dapat diberikan penghargaan.**
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:**
 - a. telah mencapai seluruh target yang ditentukan sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam Target Kinerja; dan**
 - b. tingkat penyerapan anggaran Target Kinerja dan kegiatan yang optimal.**

Pasal 7

- (1) Penghargaan yang diberikan kepada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) berupa penambahan alokasi anggaran untuk tahun anggaran 2016.**
- (2) Penambahan alokasi anggaran untuk Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.**
- (3) Penambahan alokasi anggaran untuk Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.**
- (4) Penambahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat pagu alokasi anggaran.**

Pasal 8

- (1) Unit Eselon I dan Kantor Wilayah yang telah melaksanakan Target Kinerja tetapi tidak memenuhi target capaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dikenakan sanksi.**
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan alokasi anggaran untuk tahun 2016.**

Pasal 9

Pengenaan sanksi terhadap Unit Eselon I dan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tidak boleh menghambat pencapaian target untuk tahun berikutnya dan menurunkan kualitas pelayanan publik.

Pasal 10

Menteri membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Target Kinerja

Pasal 11

Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas:

- a. memantau pelaksanaan Target kinerja;**
- b. mengevaluasi laporan pelaksanaan Target Kinerja;**
- c. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan Target Kinerja; dan**
- d. menyampaikan usul dan pertimbangan kepada Menteri mengenai Unit Eselon I dan Kantor Wilayah yang akan diberikan penghargaan atau dikenakan sanksi.**

Pasal 12

Menteri menetapkan Unit Eselon I dan Kantor Wilayah yang akan diberikan penghargaan atau dikenakan sanksi dengan Keputusan Menteri.

Pasal 13

Pelaksanaan Target Kinerja dilakukan tanpa menimbulkan pembebanan biaya baru pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Unit Eselon I dan Kantor Wilayah tahun anggaran 2015.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA TAHUN 2015

TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015

A. Target Kinerja Unit Eselon I

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
7	Penguasaan pola pikir dan budaya kerja dalam kerangka revolusi mental	Adanya Komitmen Pimpinan yang kuat dan konsisten dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Dilandukungnya pakta integritas "REVOLUSI MENTAL" oleh Menteri Hukum dan HAM, 11 pimpinan unit eselon I, 33 Kepala Kantor Wilayah, dan 773 Kepala LPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.	B06 : Dilandukungnya pakta integritas "REVOLUSI MENTAL" oleh Menteri Hukum dan HAM dan 11 pimpinan unit eselon I dan eselon II Pusat dan 33 Kepala Kantor Wilayah B09 : Dilandukungnya pakta integritas "REVOLUSI MENTAL" oleh 387 Kepala LPT D12 : Dilandukungnya pakta integritas "REVOLUSI MENTAL" oleh 386 Kepala	Tina Roflunasi Birokrasi Kementerian (Koordinator : Sekretaris Jenderal)

NO	TARGET KINERJA	PENANGGULUNG JAWAB
	KRITERIA KEBERHASILAN	
	UKURAN KEBERHASILAN	
	TARGET CAPAIAN	
	UPT	
	<p>Tersosialisasikannya dan terinternalisasikannya nilai-nilai Kementerian Hukum dan HAM dalam semangat "Kami PASTI" dengan yel-yel "Salam Pembangunan.....Kami PASTI!!" kepada 44.178 pegawai Kementerianham</p> <p>BO6 : Sosialisasi "Kami PASTI" melalui media web resmi Kementerianham</p> <p>2. Terjituinya SE terkait memasukkan nilai semangat "Kami PASTI" kedalam materi arahan pimpinan baik di tingkat pusat maupun Kantor Wilayah.</p> <p>DO9 : Survey tingkat pemahaman pegawai terhadap nilai-nilai "Kami PASTI" beserta yel-yelnya.</p> <p>DI12 : Rekomendasi tindak lanjut atas hasil survey</p> <p>BO6 : Terbitkannya Surat Perintah Agen Pembaharuan sosialisasi</p> <p>BO9 : Pembuatan Modul untuk <i>coaching and mentoring</i> serta implementasinya</p> <p>Agan Pembaharuan sebagai <i>role model</i> dalam reformasi birokrasi dalam rangka revolusi mental</p> <p>Terbitkannya agen pembaharuan melalui <i>coaching and mentoring</i> dengan penerapan <i>reward punishment</i></p>	<p>1.11 Unit Eselon I</p> <p>2. Pusjambang (BO9)</p> <p>Tim Reformasi Birokrasi Kementerianham</p>

NO	TARGET KINERJA	PENANGGIL NO JAWAB
	KRITERIA KEBERHASILAN	
	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
	<p>Adanya petunjuk perilaku pegawai terhadap kinerja, etika, dan kedisiplinan.</p> <p>Meningkatnya 20% tingkat disiplin pegawai dilihat dari indikator absensi dan pembayaran tunjangan keluarga</p> <p>B12 : Monitoring dan evaluasi</p> <p>B06 : 1. SE Penertiban absensi pegawai 2. SE Pencanangan gerakan "Ayo Kerja" B09 : Implementasi "Ayo Kerja" B12 : Laporan Monitoring dan Evaluasi</p>	11 Unit Eselon I
2	<p>Pembentukan Sistem Sistem Informasi dan Database Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>Tersedianya Sistem Informasi Pembentukan dan Database Peraturan Perundang-undangan akurat dan update</p> <p>Masyarakat dapat mengakses Sistem Informasi Pembentukan dan Database Peraturan Perundang-undangan melalui internet secara gratis.</p> <p>B06 : 1. Dibentuk Tim Penyelidikan konten dan Database Peraturan Perundang-undangan 2. Tersusun Konten dan Aplikasi Sistem Informasi Pembentukan Peraturan</p>	<p>Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>Ditjen. Peraturan Perundang-Undangan</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGIL NO JAWAB
		(terkini).		<p>Perundang-undangan 3. Terbertuknya Konverter Peraturan Perundang- undangan 4. Penyelesaian input database 5. Peresmian (launching) Pusat Data dan Web Peraturan Perundang- undangan</p> <p>BOY :</p> <p>1. Tersediarnya Sistem Informasi Pembentukan dan Database Peraturan Perundang-undangan yang dapat diakses oleh masyarakat secara cepat, akurat dan update (terkini)</p> <p>2. Pembaruan dan Penambahan Konten dan Database Peraturan Perundang-undangan yang mengaksesi Sistem Informasi dan Database Peraturan Perundang- undangan</p> <p>B12: a. Data Jumlah Pengunjung</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGULUNG JAWAB
3	<p>Percepatan penyusunan Rancangan Undang-Undang yang mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.</p>	<p>Terlaksananya penyusunan Rancangan Undang-Undang yang mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara insentif</p>	<p>Tersusunnya Rancangan Undang-Undang yang mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.</p>	<p>BO6 : 1. Dilaksanakannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pembentukan panitia antar kementerian penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ekstradisi dan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Asset Tindak Pidana. 2. Terlaksananya rapat-rapat Panitia Penyusunan KUU tentang Ekstradisi 3. Terlaksananya rapat-rapat Panitia Penyusunan KUU tentang Perampasan Asset Tindak Pidana BO9 : 1. Tersusunnya RUU tentang Ekstradisi 2. Penyampaian RUU tentang Ekstradisi hasil</p>	<p>Ditjen. Peraturan Perundang-Undangan</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGIL NO JAWAB
				PAK untuk dilakukan pengharmonisasian, penbulatan, dan penataran konsepsi. 3. Terselenggaranya Pengharmonisasian RUU tentang Ekstradisi 4. Terlaksananya rapat antar kementerian dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang penempatan aset tidak pidana. B12 : 1. Terselaksananya pengharmonisasian RUU tentang Ekstradisi. 2. Penyempurnaan usul Prolegnas prioritas 2016 untuk Rancangan Undang-Undang ekstradisi 3. Tersusunnya RUU tentang Perampasan Aset Tidak Pidana	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGIL NO JAWAR
4	Penyempurnaan Buku Panduan Penyusunan Peraturan Daerah	Terlaksananya penyempurnaan Buku Panduan Penyusunan Peraturan Daerah	Adanya kemudahan dan penyempurnaan mekanisme penyusunan peraturan daerah.	D06 : 1. Tersusunnya panduan penyusunan Penyempurnaan Buku Panduan Penyusunan Peraturan Daerah 2. Tersusunnya rencana kerja penyusunan Penyempurnaan Buku Panduan Penyusunan Peraturan Daerah 3. Tersusunnya Penyempurnaan Bab I Pendahuluan dan Bab II Kebutuhan, Fungsi, dan Mekanisme Peraturan Daerah Buku Panduan Penyusunan Peraturan Daerah B09 : 1. Tersusunnya Draft Penyempurnaan Bab III Aspek Aspek Pembentukan Peraturan Daerah, Bab IV Landasan dan Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah, dan Bab V Aksesibilitas Publik	Dijem. Peraturan Perundang Undangan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGIL NO JAWAB
				<p>Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Buku Panduan Penyusunan Peraturan Daerah</p> <p>2. Tersusunnya Draft Penyempurnaan Bab VI Pengintegrasian Prinsip Hak Asasi Manusia, Kesetaraan Gender, dan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bab VII Penyusunan Perda APBD, Perda Pajak Daerah, Perda Retribusi Daerah, Perda Rencana Tata Ruang Daerah, dan Pembentukan Organisasi Pemerintah Daerah dan Bab VIII Jenis Norma, Perumusan Norma, dan Bahasa Serta Terancang untuk Penegakan Hukum Teraturan Perundang- undangan Buku penyusunan peraturan daerah.</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGULUNG JAWAB
5	Penataan dan peningkatan organisasi	<p>Merupakan kajian terhadap penguatan unit kerja organisasi, Tataletksana, Kepegawaian dan Diklat pada Unit Eselon I</p>	<p>Adanya dokumen rekomendasi hasil kajian terhadap penguatan unit kerja organisasi, Tataletksana, Kepegawaian dan Diklat pada Unit Eselon I</p>	<p>D.12 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya draft penyempurnaan Bab IX Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Buku Panduan Penyusunan Peraturan Daerah 2. Tersusunnya Buku Panduan Penyusunan Peraturan Daerah yang disempurnakan <p>B06 : Rapat koordinasi sebanyak minimal 3 kali</p> <p>B09 : Tersusunnya kajian penguatan unit kerja organisasi, Tataletksana, Kepegawaian dan Diklat pada Unit Eselon I</p> <p>B12 : Dokumen rekomendasi hasil kajian penguatan unit kerja organisasi, Tataletksana, Kepegawaian dan Diklat pada Unit Eselon I.</p> <p>B06 : Rapat Koordinasi sebanyak minimal 4 kali</p>	<p>Pusjantara -Sekretariat Jenderal</p>
	Usulan perbaikan Organisasi Tataletksana	Terbitnya Penunukunham tentang penabhar Organisasi Tataletksana			<p>Biro Perencanaan - Sekretariat Jenderal & 10 Unit Eselon II lainnya</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGIL NO JAWAB
		dalam rangka penguatan fungsi eselon I	Pusat	B09 : Tersusunnya kajian ORTA Pusat B12 : Terjaitnya Permenkumham tentang peraturan Organisasi Tataloksona Pusat B06 : Rapat koordinasi sebanyak minimal 4 kali B09 : Tersusunnya Kajian tentang uraian tugas dan fungsi re- organisasi pada Balitbangham B12 : Terjaitnya Permenkumham tentang uraian tugas dan fungsi re-organisasi pada Balitbangham.	Biro Perencanaan- Sekretariat Jenderal & 10 Unit Eselon I Lainnya
		Peningkatan kelas jabatan melalui penataan organisasi Eselon I ke bawah.	Terbitnya Permenkumham tentang peningkatan kelas jabatan melalui penataan organisasi Eselon I ke bawah.	B06 : Rapat koordinasi sebanyak minimal 4 kali B09 : Kebijakan dan kajian tentang peningkatan kelas jabatan melalui penataan organisasi	Biro Perencanaan- Sekretariat Jenderal & 10 Unit Eselon I Lainnya

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
6	Penataan dan penguatan pelaksanaan tataletaknya	Melakukan Pemetaan terdapat proses bisnis dalam melaksanakan tugas dan fungsi.	Tersusunnya dokumen pemetaan proses bisnis Kementerian Hukum dan HAM	Eselon I ke bawah. B12 : Terjinya Permenkumham tentang peningkatan kelas jabatan melalui penataan organisasi Eselon II, III, IV dan V B06 : Rapat koordinasi sebanyak 6 kali B09 : Draft dokumen pemetaan proses bisnis Kementerian Hukum dan HAM B12 : Terjinya Kepmenkumham ttg dokumen pemetaan proses bisnis Kementerian Hukum dan HAM	Biro Perencanaan- Sekretariat Jenderal & 10 Unit Eselon I Lainnya
	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan informasi publik secara berkala.	100% masyarakat memperoleh informasi publik sesuai aturan dan kebijakan ketenagakerjaan informasi yg diatur dalam Undang-undang	B06 : Inventarisasi daftar informasi yang dapat dipublikasikan B09 : Publikasi informasi terkait RENSTRA, RKAKL, LAPORAN BMN, LAKIP. B12 : Publikasi informasi terkait mutasi dan rotasi	Biro Humas Dan Bagian Humas 10 Unit Eselon I	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGULUNG JAWAB
		Menyusun SOP terhadap pengumpulan proses bisnis pada kegiatan utama yang belum dibuat SOP.	Dokumen SOP yang telah disempurnakan.	<p>ditiriskan:</p> <p>Kemendukham, dan pengadaaan jaras.</p> <p>BKMs :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raper koordinasi minimal 3 kali 2. Inventarisasi SOP yang tidak up to date. <p>B09 :</p> <p>Penyempurnaan SOP sebanyak 50 SOP</p> <p>B12 :</p> <p>Penyempurnaan SOP sebanyak 50 SOP</p>	<p>Biro Perencanaan-Sekretariat Jenderal & 10 Unit Eselon I Lainnya</p>
		Menyusun Grand Design Sistem IT Kemendukham Tahun 2015 – 2019	Terdapatnya arah pengembangan Teknologi Informasi di satuan kerja Kemendukham	<p>LM6 :</p> <p>Pemberitukan SK Tim Grand Design Sistem IT Kemendukham tahun 2015 – 2019</p> <p>B09 :</p> <p>Rapat pembalasan Grand Design Sistem It Kemendukham 2015 – 2019</p> <p>B12 :</p> <p>Perintahnya Peraturan Menteri Hubdan dan HAM tentang Grand Design Sistem IT Kemendukham tahun 2015 – 2019</p>	<p>Biro Perencanaan-Sekretariat Jenderal & 10 Unit Eselon I Lainnya</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGULUNG JAWAB
7	Penilaian dan penguatan Sistem Manajemen SDM	Terintegrasi terasik antara penilaian kinerja pegawai (SKP) secara online berbasis website pkip.kemerkumham.go.id yang bisa update setiap saat datanya.	50% dari seluruh pegawai Kementerian telah mengisi SKP secara online	BO6 : Sosialisasi penilaian kinerja pegawai (SKP) secara online berbasis website pkip.kemerkumham.go.id . BO9 : 25% pegawai Kementerian mengisi SKP B12 : 1. 25% pegawai Kementerian mengisi SKP 2. Laporan Morev SKP	Diro Kepegawaian Dan Bagian Kepegawaian Unit Eselon I
	Integrasi dan Otomasi Administrasi dan Pelayanan Kepegawaian dalam SIMPEG	Telaksananya administrasi dan pelayanan kepegawaian secara otomatis dan terintegrasi dalam SIMPEG	BO6 : • ADM dan pelayanan KCB dan cuti terintegrasi dengan SIMPEG • ADM jabatan struktural terintegrasi dengan SIMPEG BO9 : ADM penerapan hukum disiplin terintegrasi dengan SIMPEG B12 : ADM pemberhentian PNS terintegrasi dengan SIMPEG.	Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
		Pola mutasi berbasis kinerja disesuaikan dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara Nomor : 5 Tahun 2014.	Adanya dokumen Grand Design mutasi berbasis kinerja di lingkungan Kementerian untuk tahun 2015-2019	B06 : Rapat koordinasi minimal 6 kali B09 : Draft pola mutasi berbasis kinerja sesuai dengan UU No.5 Tahun 2014 ttg ASN B12 : Terbitnya Peraturan Menteriham ttrg Grand Design mutasi berbasis kinerja di lingkungan Kementerian untuk tahun 2015-2019.	Biro Kepegawaian-Sekretariat Jenderal
	Assesment dalam rangka ketepatan penempatan pegawai sesuai kompetensi dalam rangka promosi jabatan struktural dan fungsional tertentu	Seluruh pegawai yang akan menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu mendapatkan kesempatan untuk di assesment.	B06 : Inventarisasi data assesment usulan perempatan pegawai B09 : Melakukan assesment tahap I (50% dari usulan promosi) B12 : Melaksanakan assesment tahap II (50% dari usulan promosi)	Biro Kepegawaian-Sekretariat Jenderal	
	Percepatan peningkatan kompetensi	Terselenggaranya assesment menggunakan metode Computer Assisted	B06 : 1. SK Tim PelaksanaAssesment	BPSDM	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGIL NO JAWAB
	assessmen menggunakan metode CAT, diklat menggunakan metode e learning	melalui Test (CAT)	SK Teserta Assesmen dengan menggunakan metode CAT pada 13 Kantor Wilayah (14 SK) 2. Analisa data hasil assessment 3. Pemberitahuan hasil assessment untuk 11 Kantor Wilayah		
	Percepatar peningkatan kompetensi melalui Assesmen menggunakan metode CAT dan diklat menggunakan metode e-learning	Terselenggaranya assesment pegawai menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT)	B09 : Input data Assesment Pegawai di CBHRIS 2.700 orang (1 dokumen) B12 : Laporan pelaksanaan assesment melalui Computer Assisted Test bagi pegawai (1 dokumen) B06: 1. SK Tim Pelaksanaan Assesment dan SK Peserta Assesment menggunakan metode CAT pada 13 Kantor Wilayah (14 SK) 2. Analisa data hasil Assesment 3. Pemberitahuan hasil	IPPSDM	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGILAH JAWAB
			Terselenggaranya penyelenggaraan kompetensi pegawai melalui Diklat Metode e learning	asesmen untuk 13 Kantor Wilayah BO9: Input data Assessment Pegawai di CBHRJS 2.700 orang (1 dokumen) B: 2: Laporan pelaksanaan assessment melalui Computer Assisted Test bagi pegawai (1 dokumen) BO6: 1. SK Tim Pelaksana, Peserta dan Tenaga Pegajar diklat metode e learning untuk 17 angkatan (51 SK) 2. Pelaksanaan diklat metode e-learning 17 angkatan (17 dokumen) BO9: 1. SK Tim Pelaksana, Peserta dan Tenaga Pegajar diklat metode e- learning untuk 15 angkatan (45 SK) 2. Pelaksanaan diklat metode e-learning 15 angkatan (15 dokumen)	

NO TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	TUKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGIL NO JAWAB
	<p>Tingkatkan Kompetensi Aparatur Penegak Hukum dan Instruksi Terkait di Bidang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu</p>	<p>Terselenggaranya diklat SPPA bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instruksi Terkait dan SPPA bagi Aparatur Penegak Hukum</p>	<p>BO6:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Tim Pelaksana, Peserta dan Tenaga Pengajar diklat metode e learning untuk 14 angkatan (42 SK) 2. Pelaksanaan diklat metode e learning 14 angkatan (14 dokumen) 3. Kyahasi Pelaksanaan diklat metode e-learning (1 Dokumen) <p>B.2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Tim Pelaksana, Peserta dan Tenaga Pengajar diklat metode e learning untuk 14 angkatan (42 SK) 2. Pelaksanaan diklat metode e learning 14 angkatan (14 dokumen) 3. Kyahasi Pelaksanaan diklat metode e-learning (1 Dokumen) <p>BO9:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Tim Pelaksana, Peserta dan Tenaga Pengajar diklat SPPA Bagi Appakum untuk 3 angkatan (9 SK) 2. Pelaksanaan diklat SPPA Bagi Appakum untuk 3 angkatan (120 orang, 3 dokumen) 	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGIL NO JAWAB
				Bagi Aparatur untuk 3 angkatan (120 orang, 3 dokumen) 3. SK Tim Pelaksana, Peserta dan Tenaga Pengajar diikut SPPPT Bagi Aparatur untuk 1 angkatan (3 SK) 4. Pelaksanaan diikut SPPPT Bagi Aparatur untuk 1 angkatan (40 orang, 1 dokumen). H.2: 1. SK Tim Pelaksana, Peserta dan Tenaga Pengajar diikut SPPA Bagi Aparatur untuk 1 angkatan (3 SK) 2. Pelaksanaan diikut SPPA Bagi Aparatur untuk 1 angkatan (40 orang, 1 dokumen) 3. Evaluasi Pelaksanaan diikut SPPA dan SPPPT (2 Dokumen) JY6: SK Tim Pelaksana, Peserta dan Tenaga Pengajar diikut HAM bagi Aparatur untuk 5 angkatan (15 SK)	

NO	TARGET KINERJA	PENANGGIL NO JAWAB
	<p>KRITERIA KEBERHASILAN</p> <p>Marusia</p> <p>BO9: Pelaksanaan Diklat HAM bagi Aparatur untuk 4 angkatan (120 orang, 4 dokumen)</p> <p>B12: 1. Pelaksanaan Diklat HAM bagi Aparatur untuk 1 angkatan (30 orang, 1 dokumen)</p> <p>2. Evaluasi pelaksanaan Diklat HAM bagi Aparatur (1 dokumen)</p>	
	<p>Tingkatkan Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Terselenggaranya diklat Penguatan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda</p> <p>BO6: 1. SK Tim Pelaksana, Peserta dan Tenaga Pengajar diklat Calon Pejabat Fungsional Perancang Perundang-undangan untuk 2 angkatan (6 SK)</p> <p>2. Pelaksanaan diklat Calon Pejabat Fungsional Perancang Perundang-undangan untuk 2 angkatan (60 orang, 2 dokumen)</p> <p>3. SK Tim Pelaksana, Peserta dan Tenaga Pengajar diklat Penguatan</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGIL NO JAWAB
				<p>Perencanaan untuk 1 angkatan (3 SK)</p> <p>4. Pelaksanaan dikelat Penguatan Perencanaan untuk 1 angkatan (30 orang, 1 dokumen</p> <p>B09:</p> <p>1. SK Tim Pelaksana, Peserta dan Tenaga Pengajar dikelat Calon Pejabat Fungsional Perencanaan Perundang-undangan untuk 1 angkatan (3 SK)</p> <p>2. Pelaksanaan dikelat Calon Pejabat Fungsional Perencanaan Perundang-undangan untuk 1 angkatan (30 orang, 1 dokumen)</p> <p>3. SK Tim Pelaksana, Peserta dan Tenaga Pengajar dikelat Terencana Perundang undangan: Ahli Muda untuk 2 angkatan (6 SK)</p> <p>4. Pelaksanaan dikelat Perencana Terundang undangan Ahli Muda untuk 2 angkatan (60</p>	

NO TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGULUNG JAWAB
		orang, 2 dokumen) B12: Evaluasi Pelaksanaan diklat Penguatan Perancang Peraturan Perundang- undangan, Calon Perancang Peraturan Perundangan Tingkat Pertama dan Perancang Perumusan Perundang-undangan Tingkat Muda (3 Dokumen)	
8 Penguatan akuntabilitas kinerja	Pemberlakuan "bank kader" dukungan Kementerian Hukum dan HAM RI Terbentuknya kader-kader profesional dukungan Kementerian Hukum dan HAM	B06 : Rapat koordinasi minimal 3 kali B09 : Penyusunan daftar inventarisasi kader profesional kementerian B12 : Penetapan kader profesional kementerian hukum dan HAM sebanyak 200 orang B06 : Rapat koordinasi B09 : 25 % kinerja pegawai telah dilakukan evaluasi secara online	Biro Kepegawaian- Sekretariat Jenderal Dan Bagian Kepegawaian Unit Eselon I Biro Kepegawaian- Sekretariat Jenderal

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGULUNG JAWAB
9	Perkuat pengawas dan pengendali internal	e-Lakip Kementerian secara online	Tersedianya aplikasi e-Lakip Kementerian online	B12 : 50% kinerja pegawai dilakukan evaluasi secara online B06 : Rapat koordinasi B09 : Tersedianya konlcan aplikasi e- LAKIP B12 : Uji coba aplikasi e-Lakip B06 : Tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat Semester I B09 : Tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat tahunan III B12 : Laporan evaluasi penerapan pengaduan masyarakat B06 : penyusunan tim mengurai masalah benuran kepertingar di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM B09 :	Biro Perencanaan- Sekretariat Jenderal & 10 Unit Eselon I Lainnya
		Terlaksananya penerapan pengaduan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti	Inspektorat Jenderal	
		Adanya aturan mengenai benuran kepertingar. Di Kementerian Hukum dan HAM	1. Terbitnya aturan berupa Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur masalah benuran keperlingan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Inspektorat Jenderal	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGULUNG JAWAB
		HAM 2. Tersosialisasikannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur masalah ketentuan kepentingan ditingkatkan Kementerian Hukum dan HAM	Rapat koordinasi mengenai Aturan berturun kepertingan B12 : : Terjunnya aturan berupa Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur masalah berturun kepertingan dilir pkuur gan kementerian Hukum dan HAM 2. Sosialisasi melalui website		Inspektorat Jenderal
	Tercantumnya Zona integritas menuju Satuan Kerja WBK/WBBM	Tetapan Jumlah Satuan kerja yang diusulkan dengan Tredikat WBK/WBBM	BO6 : Pelaksanaan pembinaan Satker menuju WBK/WBBM BO9 : Laporan pembinaan, penilaian dan usulan Satker WBK dan WBBM B12 : Evaluasi kegiatan pelatihan Satker WBK dan WBBM	BO6 : perencanaan pembangunan sistem aplikasi pelaporan gratifikasi online di lingkungan Kemendiknas	Inspektorat Jenderal

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGULUNG JAWAB
		terjamin kerahasianya	B09 : Tersedianya sistem aplikasi pelaporan gratifikasi online B12 : Sosialisasi, evaluasi dan tindak lanjut.		
	Peningkatan kompetensi dan penguasaan APP dalam mengelola program dan kegiatan	Meningkatkan kompetensi APP dalam peningkatan pengawasan	B06 : Koordinasi dengan penyelenggara kegiatan yaitu baik internal dan eksternal B09 : Terlaksananya pelatihan dan pendidikan aparaturnya dengan minimal 25% dari total jumlah auditor B12 : Laporan evaluasi pelaksanaan peningkatan pendidikan dan pelatihan APP	Inspektoral Jenderal	
	Mitigasi Risiko dalam kegiatan utama pada setiap satuan kerja	unit eselon I telah dilakukan mitigasi risiko	B06 : Tembakur tim dan rapat tim B09 : 1. pembuat standar pelaksanaan mitigasi risiko dalam kegiatan utama dalam setiap unit eselon I 2. Sosialisasi dan koordinasi	Inspektoral Jenderal	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUT JAWAB
10	Peningkatan mutu dan standar layanan publik	Melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala	Seluruh pelayanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dilakukakan evaluasi dan review	<p>standar pelaksanaan mitigasi risiko dalam kegiatan utama terhadap 11 unit eselon I</p> <p>B12 : Laporan pelaksanaan mitigasi risiko terhadap kegiatan utama dalam unit eselon I</p> <p>B06 : Pelaksanaan evaluasi SPJP pada Sekder di lingkungan Kementerianham</p> <p>B09 : Laporan evaluasi kegiatan implementasi SPJP di lingkungan Kementerianham B12: Laporan kompilasi dan penelaah pelaksanaan SPJP</p> <p>B06 : Rapat koordinasi antar unit layanan</p> <p>B09 : Evaluasi dan review pelayanan publik B12 : Rekomendasi dan tindak</p>	<p>Inspektoral Jenderal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditjen, Integrasi • Ditjen AHU • Ditjen ITKI • Ditjen Pemasaraktan

NO	TARGET KINERJA	PENANGGULUNG JAWAB
	KRITERIA KEBERHASILAN	
	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
	TARJUK	
	<p>Penyusunan Pedoman Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik</p> <p>Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM ttg Pedoman Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik</p> <p>BO6 : Rapat koordinasi minimal 3 kali BO9 : Adanya kajian ttg Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik B12 : Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM ttg Pedoman Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen. Imigrasi • Ditjen AHU • Ditjen HKI • Ditjen Pemasaran • Ditjen Pembangunan
	<p>Hasil survey kepuasan masyarakat di upload pada website Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>Dipublikasikannya hasil survey kepuasan masyarakat pada web resmi kementerian</p> <p>BO6 : Rapat koordinasi minimal 3 kali BO9 : Upload hasil survey kepuasan masyarakat B12 : Monev dan tindak lanjut</p>	<p>Tujuan lain</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditjen. Imigrasi • Ditjen AHU • Ditjen HKI • Ditjen Pemasaran
	<p>Penyusunan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Standar</p> <p>Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Instrumen Monitoring dan Evaluasi Standar</p> <p>BO6 : Rapat koordinasi penyusunan monev SPM minimal 4 kali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen. Imigrasi • Ditjen AHU • Ditjen HKI • Ditjen Pemasaran

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGIL NO JAWAB
11	Penguatan layanan administrasi hukum umum	Pelayanan Minimal	Pelayanan Minimal	B09 : Draft instrumen move STM B12 : Terjalinnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Instrumen Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal	■ Pusjانبang ■ Sekretariat Jenderal
		Terwujudnya sistem database Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan secara elektronik	Masyarakat memperoleh layanan sistem database Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan secara elektronik	B06 : 1. Pembentukan Tim Koordinasi Kegiatan 2. Pencapaian dan Porsi Migrasi Data B09 : Pelaksanaan Migrasi 50% B12 : Pelaksanaan migrasi 100 %	
		Penyusunan Kebijakan, Peraturan, Regulasi, Permasalahan, Warga Negara Tanpa Dokumen (<i>Undocumented</i>) di Indonesia	Disalkannya Permenkumham tentang Permasalahan Warga Negara Tanpa Dokumen (<i>Undocumented</i>) di Indonesia	B06 : Pembentukan Tim Pengumpulan Data dan Bahan Materi B09 : Penyusunan Permenkumham tentang Permasalahan Warga Negara Tanpa Dokumen (<i>Undocumented</i>) di Indonesia B12 : Terjalinnya Permenkumham	
				Ditjen. AHU	

NO	TARGET KINERJA	PENANGGULUNG JAWAB
	KRITERIA KEBERHASILAN	
UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	
12 Penguasaan layanan keimigrasian	<p>Tersedianya fasilitas Autogate untuk pemeriksaan keimigrasian warga negara Indonesia yang masuk dari luar melalui TPI Bandar Udara Juanda dan Bandar Udara Soeta Terminal 3 Ultimate.</p> <p>Operasionalisasi Autogate untuk pemeriksaan keimigrasian warga negara Indonesia yang masuk dari luar melalui TPI Bandar Udara Juanda sebanyak 4 (empat) unit di kedatangan dan 3 (tiga) unit di keberangkatan, TPI Bandar Udara Soeta Terminal 3 Ultimate sebanyak : 5 (lima belas) di kedatangan dan : 0 (sepuluh) unit di kedatangan.</p> <p>B06 : 1. Penunjukan Tim Pelaksana Partisipatif 2. Pengadaan dan pemasangan perangkat keimigrasian 3. Ujicoba implementasi Autogate di TPI Bandar Udara Juanda dan TPI Bandar Udara Soeta yang keseluruhannya sejumlah 31 Autogate.</p> <p>B09 : Implementasi (launching) pemeriksaan keimigrasian warga negara Indonesia yang masuk dari luar melalui TPI Bandar Udara Juanda dan Bandar Udara Soeta Terminal 3 Ultimate dengan fasilitas Autogate</p> <p>B12 : Monitoring dan evaluasi.</p>	Ditjen. Imigrasi

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGIL NO JAWAB
		Implementasi Sistem Informasi Antrean Permohonan Paspor	Terlaksananya operasional Sistem Informasi Antrean Permohonan Paspor di 53 Kantor Imigrasi	BO6 : 1. Pembentukan Tim Pelaksana Persiapan; 2. Pengadaan Sistem Informasi Antrean Permohonan Paspor dengan Urut Layaran Pengadaan Ditjenim untuk 53 Kantor Imigrasi; 3. Pemanggar dan uji coba di 7 Kantor Imigrasi. 4. Pemanggar dan uji coba Sistem Informasi Antrean Permohonan Paspor di 5 Kantor Imigrasi (tahap II) sehingga totalnya menjadi 12 Kantor Imigrasi. BO9 : Pemaksanaan dan uji coba Sistem Informasi Antrean Permohonan Paspor di 20 Kantor Imigrasi (tahap III) sehingga totalnya menjadi 32 Kantor Imigrasi. B12 : 1. Pemanggar dan uji coba Sistem Informasi Antrean Permohonan Paspor di 21 Kantor Imigrasi (tahap IV) sehingga totalnya menjadi	Dijeri Imigrasi

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGULUNG JAWAB
				53 Kantor Imigrasi; 2. Pemantauan dan evaluasi	
		Implementasi sistem pelaporan orang asing online	Terlaksananya aplikasi sistem pelaporan orang asing online di Kantor Imigrasi.	<p>B06 : 1. Pembentukan Tim Rancang Bangun Aplikasi Sistem Pelaporan Orang Asing Online; 2. Pengkoordinasian dengan Dit. Sistik terkait dengan modul dan kesistemen.</p> <p>B09 : 1. Pengadaan perangkat lunak untuk sistem pelaporan orang asing online 2. Pelaksanaan dan uji coba di 61 (enam puluh satu) Kantor Imigrasi.</p> <p>B12 : Pelaksanaan dan uji coba di 60 (enam puluh) Kantor Imigrasi (tahap II) sehingga total menjadi : 21 (seatus dua puluh satu) Kantor Imigrasi</p>	Ditjen Imigrasi
		Implementasi penyempaian permohonan: izin perpanjangar: izin	Terlaksananya aplikasi penyempaian sistem permohonan perpanjangar: izin tinggal kunjungan	<p>B06 : 1. Pembentukan Tim Rancang Bangun Aplikasi Sistem penyempaian:</p>	Ditjen Imigrasi

2 -

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
		tinggal kunjungan secara online.	secara online di Kantor Imigrasi.	permanen: perpanjangan izin tinggal kunjungan secara online; 2. Pengkoordinasian terkait dengan modul dan pembangunan ke sistem. B09 : Pemasangan dan uji coba implementasi sistem permohonan perpanjangan izin tinggal kunjungan secara online di 10 (sepuluh) Kantor Imigrasi (tahap I) B12 : Pemasangan dan uji coba implementasi sistem permohonan perpanjangan izin tinggal kunjungan secara online di 111 (seratus sebelas) Kantor Imigrasi (tahap II) sehingga total menjadi 121 Kantor Imigrasi. B06 : 1. Menyelesaikan 10 kasus yang telah diterima ditahun sebelumnya 2. Menerima pengaduan sebanyak 5 kasus 3. Melaksanakan	
13	Penguatan layanan hak kekayaan intelektual	Percepatan Proses Penyidik atas Pelanggaran HKI	1. Penyelesaian 10 kasus yang telah ditangani pada tahun sebelumnya (T21 atau SP3) 2. 100 % tindak lanjut dari pengaduan masyarakat atas pelanggaran HKI.		Ditjen IRIK

NO	TARGET KINERJA	PENANGGIL NO JAWAB
	<div> KRITERIA KEBERHASILAN </div> <div> UKURAN KEBERHASILAN </div> <div> TARGET CAPAIAN </div>	
	<div> <p>penindakan: sebanyak 10 kasus</p> <p>BO9 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pengaduan sebanyak 20 kasus 2. Melaksanakan penindakan: sebanyak 20 kasus <p>B12 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pengaduan sebanyak 25 kasus 2. Melaksanakan penindakan: sebanyak 25 kasus </div>	
	<div> <p>Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan HKI oleh masyarakat</p> <p>Meningkatnya jumlah Anggota Masyarakat Indonesia yang memahami dan memanfaatkan HKI</p> <p>BO6 : Penetapan kawasan berbudaya HKI (KBHKI) sebanyak 7 kawasan</p> <p>BO9 : Meningkatnya jumlah anggota masyarakat yang memperoleh diseminasi dan sosialisasi HKI sebanyak 4 juta orang</p> <p>B12 : Meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan kekayaan intelektual pada 33 provinsi</p> </div>	Ditjen HKI

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGIL NO JAWAB
	Peningkatan pelayanan dan penyelesaian pendaftaran dan/atau pemberian [Kekayaan Intelektual]	Peningkatan jumlah penyelesaian permohonan Hak Cipta dibandingkan tahun sebelumnya	BO6 : Penyelesaian permohonan pendaftaran Ciptaan sebanyak 500 dokumen dalam jangka waktu 6 bulan. BO9 : Penyelesaian permohonan pendaftaran Ciptaan sebanyak 1000 dokumen dalam jangka waktu 5 bulan. B12 : Penyelesaian permohonan pendaftaran Ciptaan sebanyak 1.500 dokumen dalam jangka waktu 4 bulan.	Dijeri III	
	Peningkatan jumlah penyelesaian permohonan Desain Industri dibandingkan tahun sebelumnya	BO6 : Penyelesaian permohonan pendaftaran Desain Industri sebanyak 2.000 dokumen dalam jangka waktu 11 bulan. BO9 : Penyelesaian permohonan pendaftaran Desain Industri sebanyak 3.000 dokumen dalam jangka waktu 10 bulan. B12 : Penyelesaian permohonan pendaftaran Desain Industri			

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGIL NO JAWAB
				sebanyak 4.000 dokumen dalam jangka waktu 9 bulan..	
		Peningkatan Jumlah penyelesaian permohonan Merek di Pengadilan tahun sebelumnya	B06 : Penyelesaian permohonan atau perpanjang Merek 25.000 permohonan B09 : Penyelesaian permohonan atau perpanjang Merek dari 37.500 permohonan B12 : Penyelesaian permohonan atau perpanjang Merek dari 50.000 permohonan		
		Peningkatan Jumlah penyelesaian permohonan Paten di Pengadilan tahun sebelumnya	B06 : 1458 Dok B09 : 2 : 87 Dok B12 : 2916 Dok		
14	Optimalisasi penggunaan Sistem Database Pemasarakan (SDP)	Tercapainya data dari informasi sistem database pemasarakan yang akurat	1. Telah dilaksanakannya Penyusunan Grand Desain IT Pemasarakan	B06 : Penyusunan draft Grand Desain IT Pemasarakan B09 : Pembahasan draft Grand Desain IT Pemasarakan B12 : Finalisasi draft Grand Desain IT Pemasarakan	Dijum Pemasarakan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUT JAWAB
			2. 50 % (lima puluh persen) Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan melakukan Penginputan data dan memvalidasi aplikasi SDP secara tertani	BO6 : 15 % (lima belas persen) Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan melakukan Penginputan dan memvalidasi data SDP secara tertani BO9 : 30 % (tiga puluh persen) Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan melakukan Penginputan dan memvalidasi data SDP secara tertani B12 : 50 % (lima puluh persen) Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan melakukan Penginputan dan memvalidasi data SDP secara tertani BO6 : 1. Finalisasi standar penilaian berkekelakuan baik Warga Binaan Pemasyarakatan berbasis teknologi informasi 2. Uji manual standar berkekelakuan baik	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGIL NO JAWAB
				3. Evaluasi uji manual BO9: 1. Pengembangan Aplikasi/ fitur standar penilaian berkekelakuan baik Warga Binaan Penasyyarakatan 2. Uji Fungsi aplikasi B12: Uji Petik dan Sosialisasi standar penilaian berkekelakuan baik Warga Binaan Penasyyarakatan nerasias teknologi informasi pada : Lapas pilot	
			b. Remisi online	BO6: Pengembangan fitur remisi online BO9: 1. Uji fungsi Aplikasi/ fitur remisi online 2. Penyusunan regulasi remisi online B12: Uji Petik dan Sosialisasi remisi online BO6: Draft dan fitur Pengawasan program pembinaan dan pembimbingan	
			c. Pengawasan program pembinaan dan pembimbingan		

NO	TARGET KINERJA	PENANGGULUNG JAWAB
	<div> <div>KRITERIA KEBERHASILAN</div> <div>UKURAN KEBERHASILAN</div> <div>TARGET CAPAIAN</div> </div>	
	<div> <div> d. Perawatan dan pelayanan kesehatan di Lapas, Rutan dan Bapas </div> <div> BO9: Aplikasi/fitur Pengawasan program pembinaan dan pembinaan BO12: Uji Petik dan Sosialisasi Pengawasan program pembinaan dan pembinaan BO6: Pengembangan fitur Perawatan dan pelayanan kesehatan di Lapas, Rutan dan Bapas BO9: Pengembangan fitur Perawatan dan pelayanan kesehatan di Lapas, Rutan dan Bapas BO12: Uji fungsi Aplikasi/fitur Perawatan dan pelayanan kesehatan di Lapas, Rutan dan Bapas BO6: Tersedianya data bahan bahan sesuai format laporan bahan bahan yang memuat jumlah, jenis, estimasi nilai, waktu mulai dikelola, </div> </div>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	TUKUTAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
15	Penguasaan layanan pemasaran	Transparansi pelayanan: CB, PB, dan CMB sesuai aturan yang berlaku dan online sistem	Masyarakat memperoleh layanan CB, PB, CMB secara online, cepat dan bebas pungli	<p>situasi yang dikelola (termasuk jumlah, jenis, estimasi nilai, waktu mulai dikelola, kordisunya, dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)</p> <p>kondisinya, dan tindakan yang diambil</p> <p>BO9: Terlaksananya upload data dasar barang pada aplikasi sms gateway Difterpas</p> <p>B12: Terpublikasi dalam website Difterpas</p> <p>BO6: Jumlah WBP yang mendapatkan layanan CB, PB, CMB secara online, cepat dan bebas pungli pada bulan Januari-Mei 2015</p> <p>BO9: Jumlah WBP yang mendapatkan layanan CB, PB, CMB secara online, cepat dan bebas pungli pada bulan Juni-Agustus 2015</p> <p>B12: Jumlah WBP yang mendapatkan layanan CB, PB, CMB secara online, cepat dan bebas pungli pada bulan September-Desember 2015</p>	Dijin Pemasarakan

NO TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGIL NO JAWAB
	Redistribusi WBP dalam mengatasi over kapasitas	Menurutnya jumlah over kapasitas di Lapas/Rutan	BO6 : Terdistribusikannya WBP sebanyak : 0% dari jumlah over kapasitas BO9 : Terdistribusikannya WBP sebanyak 20% dari jumlah over kapasitas B12 : Terdistribusikannya WBP sebanyak 30% dari jumlah over kapasitas	Diijin Pemasarakatan
16 Penguatan peran pemerintah terhadap HAM	1. Terlaksananya penguatan HAM bagi aparaturnya, Ternda, Guru, tenaga kesehatan dan Satpol PP 2. Meningkatkan pemahaman HAM aparaturnya Pemda, Guru, tenaga kesehatan dan Satpol PP yang mengikuti penguatan HAM.	Pelajar, guru, tenaga kesehatan dan Satpol PP yang mengikuti penguatan HAM dan mengimplementasikan HAM di 15 Provinsi.	BO6 : 4 Provinsi BO9 : 10 Provinsi B12 : 15 Provinsi	Diijin HAM

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGIL NO JAWAR
		<p>Tersusun profil pembangunan HAM (Bidang Keselatan, Keteragakerjaan, Pendidikan dan Masyarakat Adat).</p>	<p>1. Tersusunnya profil pembangunan HAM</p> <p>2. Terpublikasikannya profil pembangunan HAM.</p>	<p>BO6 : Tersusunnya konsep indikator pembangunan HAM.</p> <p>BO9 : Tersedianya data implementasi Bidang Keselatan, Keteragakerjaan, Pendidikan dan Masyarakat Adat.</p> <p>BI2 : Tersusunnya profil pembangunan HAM Bidang Kesehatan, Keteragakerjaan, Pendidikan dan Masyarakat Adat.</p> <p>2. Tersedia dan terpublikasikannya profil pembangunan HAM Bidang Kesehatan, Keteragakerjaan, Pendidikan dan Masyarakat Adat.</p>	
17	Penguatan Peran Pemerintah Terhadap HAM	<p>Penelitian Peran Negara Terhadap Targetur Jawab Bisnis Perusahaan Tambang Dalam</p>	<p>1. Tersedianya buku hasil penelitian yang menyajikan data dari informasi Perlindungan HAM bagi masyarakat dalam operasional bisnis</p>	<p>BO6 : Tersusunnya proposal penelitian;</p> <p>2. Tersusunnya Desain Penelitian;</p> <p>3. Tersusunnya instrumen</p>	Dilaksanakan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	TIKUAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
	Penelitian Anatomi Sengket Agraia Yang Menyebabkan Konflik Sosial	perusahaan; lambang, potensi pelanggaran HAM akibat dampak kegiatan bisnis perusahaan lainnya; 2. Tersedianya rekomendasi kebijakan berupa <i>policy memo</i> dan <i>policy brief</i> yang akar disempatkan kepada pemangku kepentingan.	penelitian; 4. Tersedianya data hasil diskusi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan; 5. Terlaksananya presentasi desain penelitian; 6. Tersedianya hasil penelitian lapangan. B09 : 1. Tersusunanya hasil pengolahan dan analisa data penelitian; 2. Tersusunanya draft laporan hasil penelitian; 3. Terlaksananya presentasi hasil penelitian; 4. Tersusunanya laporan hasil penelitian. B12 : 1. Tersedianya buku hasil penelitian; 2. Tersusunanya Rekomendasi Kebijakan.	B06 : 1. Tersusunanya proposal penelitian; 2. Tersusunanya Desain Penelitian; 3. Tersusunanya instrumen	Ditbangsam

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
18	Penguatan dan Pembinaan hukum nasional	<p>(Studi Tentang Dampak Regulasi Pusat dan Daerah di Sektor Agraria Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia)</p> <p>dan daerah terhadap munculnya pelanggaran hak asasi manusia di tengah masyarakat;</p> <p>2. Tersusunnya rekomendasi kebijakan berupa <i>policy brief</i> memo dan <i>policy brief</i> yang berkaitan dengan regulasi agraria baik di tingkat pusat maupun daerah yang akan disampaikan kepada <i>stakeholders</i>.</p>	<p>penelitian;</p> <p>4. Tersedianya data hasil diskusi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan;</p> <p>5. Terlaksananya presentasi desain penelitian;</p> <p>6. Tersedianya hasil penelitian lapangan.</p> <p>B09 :</p> <p>1. Tersusunnya hasil pengolahan dan analisa data penelitian.</p> <p>2. Tersusunnya draft laporan hasil penelitian;</p> <p>3. Terlaksananya presentasi hasil penelitian;</p> <p>4. Tersusunnya laporan hasil penelitian;</p> <p>B12 :</p> <p>1. Tersedianya buku hasil penelitian;</p> <p>2. Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan.</p>	<p>B06 :</p> <p>Intervensi peraturan perundang-undangan sektor kemaritiman</p> <p>B09 :</p> <p>Identifikasi masalah dalam</p>	DPJLN

NO	TARGET KINERJA	PENANGGIL NO JAWAB
KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
<p>1. Terwujudnya peraturan pelaksanaan sistem pelayanan hukum di Kantor Wilayah (KANTWIL).</p> <p>2. Teringkatnya jumlah penerima bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin</p> <p>3. Terwujudnya sistem informasi database (SID) bantuan hukum</p> <p>4. Jumlah penerima bantuan hukum meningkat.</p>	<p>1. Terwujudnya peraturan pelaksanaan peraturan pelaksanaan No. 22 Tahun 2014</p> <p>b. Juklak penyuluhan data bantuan hukum.</p> <p>c. Juklak peng awasan</p> <p>2. Terwujudnya SOP Bankum</p> <p>3. Terwujudnya sistem informasi database (SID) bantuan hukum</p> <p>4. Jumlah penerima bantuan hukum meningkat.</p>	<p>peraturan pendukung-undangan sektor kemertanian</p> <p>B12 :</p> <p>Analisis peraturan pendukung undang-undang sektor kemertanian</p> <p>BO6 :</p> <p>1. Diselenggarakannya pelaksanaan</p> <p>2. Terselenggarakannya SOP Bankum</p> <p>3. Terselenggarakannya aplikasi SID Bankum</p> <p>BO9 :</p> <p>Digunakannya SID Bankum secara online oleh ODH dan Kantor Kemendiknas untuk mendukung sistem reimbursement dan monitoring</p> <p>B12 :</p> <p>Uraian tentang persentase permohonan bantuan hukum yang memenuhi persyaratan reimbursement karena adanya perubahan peraturan pelaksanaan dan penggunaan SID Bankum</p>
		BPHN

B. Target Kinerja Kantor Wilayah

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PEYANGGUNG JAWAB
19	Penguatan pola pikir dan budaya kerja dalam kerangka revolusi mental	Adanya komitmen pimpinan yang kuat dan konsisten dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	<p>Diundatengannya pakta integritas "REVOLUSI MENTAL" oleh Menteri Hukum dan HAM, 11 pimpinan unit eselon I dan eselon II, 33 Kepala Kantor Wilayah, dan 773 Kepala UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.</p> <p>Tersosialisasikannya dan terundatengasikannya nilai nilai Kementerian Hukum dan HAM dalam semangat "Kami PASTI" dengan jejel jejel *Salam Pembaharuan....Kami PASTI II" kepada pegawai di jajaran Kantor Wilayah dan UPT</p>	<p>B06 : Diundatengannya pakta integritas "REVOLUSI MENTAL" oleh Kepala Kantor Wilayah dan para Kepala Divisi</p> <p>B09 : Diundatengannya pakta integritas "REVOLUSI MENTAL" oleh 50% Kepala UPT</p> <p>B12 : Diundatengannya pakta integritas "REVOLUSI MENTAL" oleh 100% Kepala UPT</p> <p>B06 : 1. Sosialisasi "Kami PASTI" melalui media web resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>2. Melaksanakakan SE terkait memasudkor nilai nilai semangat "Kami PASTI" kedalam materi arahan pimpinan Kantor Wilayah</p>	Kakanwil

40

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PEWANGGUNG JAWAB
				dan UPTI pada setiap apel, upacara, dll D09 : Mengikuti Survey tingkat pemahaman pegawai terhadap nilai nilai "Kami PASTI" beserta ye] yel nya. B12 : Melaksanakan Rekomendasi tindak lanjut atas hasil survey	
		Agen Perubahan sebagai role model dalam reformasi birokrasi dalam rangka revolusi mental	Terbertukarnya agen perubahan melalui <i>coaching and mentoring</i> dengan <i>peraturan reward punishment</i>	B06 : Terbertukarnya Surat Penetapan Agen Perubahan Kantor Wilayah dan sosialisasi ke seluruh jajaran di Kauwil D09 : Melaksanakan <i>coaching and mentoring</i> serta implementasinya dengan modul dari Kantor Pusat D12 : Monitoring dan evaluasi	
				B06 : 1. Melaksanakan penertiban asserasi 2. Sosialisasi gerakan "Ayo Kerja"	
		Adanya perubahan perilaku pegawai terhadap kinerja, etika, dan	Meningkatnya 20% tingkat disiplin pegawai dilihat dari indikator absensi dan pembayaran tunjangan		

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PEWANGGUNG JAWAB
		Kedisiplinan			
		Adanya <i>Quick Wins</i> Kementerian Hukum dan HAM berdampak dan dirasakan langsung masyarakat.	Tersosialisasikan <i>quick win</i> 2015 kepada 44.178 pegawai Kementerian.	B09 : Implementasi "Ayo Kerja" B12 : Laporan Monitoring dan Evaluasi B06 : Sosialisasi SK Menkumham tttg <i>Quick Wins</i> Kementerian Hukum dan HAM B09 : Implementasi B12 : Laporan Monitoring dan Evaluasi	
20	Peningkatan Pelayanan Publik	Pelayanan publik cepat, transparan, dan bebas pungli	Menuuturnya aduan masyarakat terkait pungli	B06 : 1. Terbertutuknya Tim Pengawas Layanan Publik 2. Rapat Koordinasi internal dan UPT 3. Penerbitan layanan publik B09 : Implementasi B12 : Laporan Monev	Kakanwil
21	Penguatan Akuntabilitas	Akuntabilitas pada seluruh aspek pelaksanaan kinerja	Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja sampai tingkat UPT	B06 : Sosialisasi aturan terkait penyusunan laporan akuntabilitas kinerja	Kakanwil

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
				D09 : Rapat koordinasi penyusunan LAKIP B12 : Laporan Monev dan penguatan akuntabilitas	
22	Penguatan Pengawasan	Pengendalian dan pengawasan pada seluruh aspek pelaksanaan kinerja	Adanya satuan tugas SIPP yang hardal dan kompeten sebagai pengendali dan pengawasan proses bisnis pada Kanwil dan UPT	B06 : Terbentuknya Tim Penguatan SIPP di Kanwil, yang beranggotakan Kakanwil, para Kadiv, Kabag PPL, Kabag Umum, Kabag Kepegawaran, dan Kepala UPT. B09 : Rapat koordinasi dan implementasi D12 : Laporan Monev pengawasan	Kakanwil
23	Tindaklanjuti temuan BPK/ BPKP/ Inspektorat Jenderal	Tindaklanjutannya tindaklanjuti temuan BPK/ BPKP/ Inspektorat Jenderal sesuai rekomendasi secara akuntabel	Berkurangnya jumlah temuan BPK/ BPKP/ Inspektorat Jenderal yang harus dilakukan tindak lanjut	D06 : Terlaksananya tindak lanjut temuan BPK/ BPKP/ Inspektorat Jenderal B09 : Terlaksananya tindak lanjut temuan BPK/ BPKP/ Inspektorat Jenderal B12 : Evaluasi dan laporan	Kadivmin

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PEWANGGUNG JAWAB
24	Perubahan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	1. Merumusnya tingkat penyempurnaan pelaksanaan tugas dan fungsi kanwil. 2. Merumusnya tingkat penyempurnaan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis.	B06: 1. Terbenluknya Sasas SPIP 2. Terselenggaranya Sosialisasi SPIP B09 : - Adanya penataan lingkungan pengendalian 2. Tersusunnya rencana tindak pengendalian (RTP) B12 : 1. Terlaksananya pengendalian internal pemerintah 2. Evaluasi dan Laporan	Kadivimin
25	Transparansi dalam Promosi/ Mutasi Pegawai melalui Baperjaka III	Terwujudnya Promosi/ Mutasi Pegawai yang transparan	1. Terlaksananya promosi, mutasi, dan rotasi pegawai eselon III dan IV melalui mekanisme Tim Penilai Kinerja 2. Terlaksananya operasi jidling internal untuk peningkatan pegawai eselon V.	B06: 1. Terbenluknya Sekretariat Tim Penilai Kinerja 2. Terlaksananya forum Tim Penilai Kinerja secara konsisten dan tepat waktu sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku B09: Terlaksananya forum Tim Penilai Kinerja secara konsisten dan tepat waktu sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku	Kadivimin

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
26	Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi e office (simAYA)	Terimplementasinya tnyu tata persuratan pada Kantor wilayah; memanfaatkan aplikasi simAYA	Terselenggaranya penatausahaan surat dinas secara cepat dan tepat	D12: 1. Terlaksananya forum Tim Penilai Kinerja secara konsisten dan tepat waktu sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku 2. Evaluasi B06: Terbentuknya Tim Pengelola simAYA B09 : Pemanfaatan simAYA dalam penatausahaan surat dinas B12: Evaluasi pemanfaatan simAYA	Kadivimin
27	Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) Kementerian	Tersedia data pegawai yang up-to-date secara on-line	Seluruh satuan kerja melaksanakan SIMPEG secara optimal	D06: Pemutakhiran data kepegawaian ke dalam SIMPEG (dossier) D09: Pemutakhiran data kepegawaian ke dalam SIMPEG (dossier) B12: 1. Pemutakhiran data kepegawaian ke dalam SIMPEG (dossier) 2. Evaluasi	Kadivimin

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PEWANGGUNG JAWAB
		Tertindakannya realisasi anggaran secara akumulatif sesuai target nasional sebesar 95%			
28	Pelaksanaan: Kejatan: sesuai Disbursement Plan		Tertindakannya output kegiatan dan realisasi anggaran sesuai disbursement plan per triwulan: 1. Triwulan I = 18 % 2. Triwulan II = 50 % 3. Triwulan III = 75 % 4. Triwulan IV = 95-100 %	PO6: 1. Tersusunnya <i>disbursement plan</i> pada seluruh satuan kerja 2. Tersusunnya laporan: penyerapan anggaran: triwulan II BO9: Tersusunnya laporan: penyerapan anggaran triwulan III H12: 1. Tersusunnya laporan penyerapan anggaran akhir tahun triwulan IV 2. Evaluasi	Kadivimin
29	Rapel koordinasi mekanisme baru seiring dengan Restrukturisasi Program dan Kejatan	Terwujudnya kesamaan pemahaman terhadap mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran pasca restrukturisasi program dan kegiatan	Tertindakannya rapel koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh jajaran: Kantor wilayah termasuk UPT	PO6 : Rapel koordinasi dan sosialisasi aturan-aturan baru BO9 : Implementasi H12 : Monitoring dan Evaluasi	Kadivimin
30	Penerbitan BMN	Pengelolaan BMN di lingkungan	.. Terlaksananya penerbitan BMN pada	BO6 : 1. Tersebutnya satuan	Kadivimin

--

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PEWANGGUNG JAWAB
		saluran kerja yang terdib hokum, terdib administrasi dan terdib fisik	tiap saluran kerja 2. Tersedianya dokumentasi digital DMN berupa tanah, bangunan dan kendaraan	tugas penertibatan DMN pada Kantor Wilayah 2. Identifikasi DMN bermasalah 3. Dokumentasi digital BMN berupa tanah, bangunan dan kendaraan B09 : 1. Rapat koordinasi tindak lanjut BMN bermasalah dengan pihak terkait lainnya, contoh: BPV, PL, 2. Terlaksananya sosialisasi kebijakan Kementerian Hukum dan HAM tentang pemeliharaan dan pengamanan BMN B12: Penyampaian laporan tindak lanjut BMN bermasalah	
31	Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan	Meningkatkan kualitas layanan kunjungan, informasi dan pengaduan	50% UPT Pemasyarakatan pada setiap wilayah menyelenggarakan Layanan Kunjungan, Pengaduan Dan Informasi berbasis IT	B06: 1. Penataan UPT pas yang telah melaksanakan layanan berbasis IT 2. Pengusutan UPT PAS yang akan melaksanakan layanan berbasis IT 3. Penyempaian penertapan	Kadivpas

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PEWANGGUNG JAWAB
				<p>modul layanan: Penasyarahatan berbasis IT B09 : Penutupan 50% UPT Pas yang menyelenggarakan layanan Penasyarahatan berbasis IT B12 : Bintorwasdal Melalui Media Online</p>	
	Menyugkanya kualitas data SIPP	50% UPT pas melakukan penginputan data SIPP secara valid	<p>B06 : 1. Pemetaan LPT Pas yang sudah melakukan penginputan data secara valid 2. Penyampaian Peraturan Menteri tentang Sistem Database Penasyarahatan B09 : 50% LPT Pas yang melakukan penginputan data SDF secara valid B12 : Bintorwasdal Melalui Media Online</p>	<p>B06 : 1. Mengusulkan peserta Ummek operator PJ online 2. Mengusulkan PJ secara</p>	Kadivpas
	Tertaksananya pergusulan Pemberian PJ secara online	Pergusulan PJ secara online di 50% Kantor wilayah			Kadivpas

17

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PEWANGGUNG JAWAB
		Peningkatan kualitas layanan kesehatan WBP	Peningkatannya layanan kesehatan Kopi/Talunan melalui kerjasama dengan instansi dan mitra terkait	<p>B06 : 1. Penyempurnaan Surat edaran untuk melaksanakan kerjasama dengan instansi dan mitra terkait</p> <p>2. Melaporkan peningkatan kualitas kesehatan kepada Napi/Talunan</p> <p>B09 : Melaporkan peningkatan kualitas kesehatan kepada Napi/Talunan</p> <p>B12 : Bintorwasdal Melalui Media Online</p>	Kadiyapas
				<p>B06 : - Tercapainya 50% WBP yang aktif dalam pembinaan keprasadian</p>	
		Meningkatkan layanan pembinaan WBP	Peningkatan pembinaan keprasadian dan mutu pelatihan kemandirian		

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PEWANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban		<p>B06 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pengamatan Satgas Kamtibmas 2. Penggeledahan rutin dan sidak gerunggan 3. Tidak lanjut temuan satgas 4. Tidak terjadi gangguan kamtibmas sebesar 10% <p>B09 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya penguatan 	
				<p>B07 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tercapainya 50% WBP yang aktif dalam pembinaan kemandirian (sertifikasi keahlian) <p>B09 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tercapainya 60% WBP yang aktif dalam pembinaan kemandirian (sertifikasi keahlian) <p>B12 :</p> <p>Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembinaan, pembinaan dan kemandirian pada Lepas/Rutan (sertifikasi keahlian)</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PEWANGGUNG JAWAB
				Satgas Kamitib 2. Penyelidikan rutin dan tidak acuan 3. Tidak lanjut venuan satgas 4. Tidak terjadi gangguan kamitb sebesar 20% B12 : Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan keamanan dan ketertiban di lapas/Kutan	
		Meningkatkan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara	Peningkatan pemeliharaan dan pengelolaan Baser dan Baran secara baik	B06 : Tercapainya 50 % baser dan baran yang dipelihara dan dikelola dengan baik B09 : Tercapainya 75 % baser dan baran yang dipelihara dan dikelola dengan baik B12 : Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan baser dan baran di Rupasas	
		Meningkatkan pembinaan masyarakatan kemasyarakatan	Peningkatan pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan arak	B06 : Tercapainya 50 % layanan Pembinaan Klien kemasyarakatan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PEWANGGUNG JAWAB
		dan peningkatan anak			
				<p>B09 : Tercapainya 75 % layanan Pembinaan Klien Kemasyarakatan</p> <p>B12 : Monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan Pembinaan Klien Kemasyarakatan</p>	
	Meningkatkan pelayanan pada Poliklinik Lepas Rutan dan Rumah Sakit Pengayoman		Terbitnya surat izin atau legalitas praktek tenaga medis dan paramedis di poliklinik Lepas Rutan dan Rumah Sakit Pengayoman	<p>B06 : Tercapainya 50 % tenaga medis dan paramedis di poliklinik Lepas Rutan dan Rumah Sakit Pengayoman yang memiliki legalitas (SIP/STR/SIPA)</p> <p>B09 : Tercapainya 75 % tenaga medis dan paramedis di poliklinik Lepas Rutan dan Rumah Sakit Pengayoman yang memiliki legalitas (SIP/STR/SIPA)</p> <p>B12 : Monitoring dan evaluasi data tenaga medis dan paramedis di poliklinik Lepas Rutan dan Rumah Sakit Pengayoman yang memiliki legalitas</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN (SIP/STR/SIPA)	PENANGGUNG JAWAB
32	Implementasi Undang-Undang No. : Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	Terlaksananya dukungan terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sesuai ketentuan yang berlaku.	1 a. Terselenggaranya Unitel PK Anak secara online b. Tersedianya PK Anak dan Pembantu PK Anak pada setiap Pos Dapas 2. Terselenggaranya minimal : (satu) Pos Dapas pada setiap Kanwil	Ind06 : 1. Pengusulan peserta Unitel PK Anak minimal sebanyak 20 orang 2. Mensosialisasikan mekanisme dan uraian tugas Pos BAPAS melalui media online 3. Mengusulkan PK Anak dan menetapkan Pembantu PK Anak. BO9 : 1. Penetapan Pos BAPAS 2. Penetapan wilayah kerja BAPAS dan mengusulkan wilayah kerja Pos BAPAS. B12 : Hinterwasdal Melalui Media Online	Kadivpas
33	Peringkasan Pembinaan Penguasaan Dan Perjudialian Dalam Rangka Gelling To Zero Harophone Pungli Dar. Markoba (HALINAR)	Optimalisasi Pelaksanaan Saluran Tugas Keamuran dan Kelembuan (Salgas Kamiti)	Pembinaan Personil Salgas Kamiti 1 kali dalam setahun	Ind06 : 1. Menyusun rencana kerja Salgas Kamiti tingkat Wilayah dan UPT 2. Penguatan Salgas Kamiti kantor Wilayah dan UPT melalui briefing 3. Penggeledahan rutin.	Kadivpas

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PEWANGGUNG JAWAB
34	Kegiatan Kerja Produktif	Optimalisasi kegiatan kerja produktif melalui kerjasama dengan pihak ke 3	Tertaksarannya 25% UPT yang melaksanakan kerjasama dengan pihak ke 3	dan tidak 4. Pembentukan Majelis Kode Etik Wilayati 5. Sidak Satgas Kamtibmas 6. Tindak lanjut terhadap temuan Satgas Kamtibmas B09 : 1. Sidak Satgas Kamtibmas 2. Tindak lanjut terhadap temuan Satgas Kamtibmas B12 : Hinterwasdal Melalui Media (online) R06 : 1. Penyiampain Blue Print Kegiatan Kerja Narapidana ke UPT Pemasyarakatan 2. Pengiriman Surat Edaran untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak ke 3 3. Pelaksanaan kegiatan kerja dengan pihak ke 3 di UPT Pemasyarakatan B09 : Pelaksanaan kegiatan kerja dengan pihak ke 3 di UPT Pemasyarakatan	Kadivnas

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
				<p>D12 : Dimonitorisasi Melalui Media Online</p>	
35	Optimalisasi Pengelolaan Basan Dan Utaran	Menguatnya peran Rupbasan dalam tugas fungsi Pengelolaan Basan dan Utaran	Terselenggaranya pengelolaan basan dan utaran melalui koordinasi kepala korpasas dengan Kepala Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan serta KPK dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama (SKB)	<p>B06 : Menginventarisasi permasalahan dalam pengelolaan basan utaran</p> <p>B09 : Melakukan koordinasi terhadap permasalahan pengelolaan basan utaran</p> <p>B12 : Bintorwasdal Melalui Media Online</p>	Kadivpas
		<p>Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan aset oleh Rumah.</p> <p>Pertimbangan berda sitaan dan barang rupaasas negara (Rupbasan)</p>	<p>Terpublikasi secara reguler dalam website Rupjasas atas pelaksanaan fungsi pengelolaan aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk jumlah, jenis, estimasi nilai, waktu mulai dikelola, kondisinya, dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang</p>	<p>B06 : Tersedianya data inventarisasi basan dan utaran masing-masing UPT Rupbasan yang memuat jumlah, jenis, estimasi nilai, waktu mulai dikelola, kondisinya, dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan</p> <p>B09 : Tersedianya data inventarisasi basan dan utaran masing-masing UPT</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			sihaan)	Rupbasan yang memenuhi jumlah, jenis, estimasi nilai, waktu mulai dikelola, kondisinya, dan uraian yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sihaan B12 : Tersedianya data inventarisasi basan dan baran masing masing UPT Rupbasan yang memuat jumlah, jenis, estimasi nilai, waktu mulai dikelola, kondisinya, dan tir dakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sihaan	
36	Peningkatan kualitas pelayanan perorbitan paspor di Kantor Imigrasi.	Menurut kualitas kepuasan masyarakat terhadap layanan paspor pada Kantor	1. Terselenggaranya paspor tepat waktu; 2. Tersedianya kenyamanan dalam pelayanan perorbitan paspor; 3. Terlaksananya pelayanan One Stop Service.	PO6: 1. Penrubenlutan: Tim pelaksanaan sosialisasi SOP One Stop Service; 2. Pengendalian pelaksanaan penyelesaian paspor 3 (tiga) hari kerja setelah foto (92%). BO9: 1. Pengendalian pelaksanaan: One Stop Service;	Kadivim

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PEWANGGUNG JAWAB
37	Pengendalian pelaksanaan pengawasan dan pembinaan perindukan keimigrasian.	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan keimigrasian.	<p>1. Meningkatkan intensitas koordinasi pengawasan dan pembinaan keimigrasian</p> <p>2. Terlaksananya pelaksanaan hukum terdapat pelanggaran keimigrasian</p>	<p>B06:</p> <p>1. Terlaksananya pengawasan keimigrasian pada 30% wilayah kerja.</p> <p>2. Terlaksananya pembinaan keimigrasian atau pelanggaran keimigrasian yang terjadi melalui mekanisme Tiridakan Administrasi Keimigrasian dan Pro Justitia (50%).</p> <p>B09:</p> <p>1. Terlaksananya pengawasan keimigrasian pada 60% wilayah kerja</p>	Kadivim

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PEWANGGUNG JAWAB
38	Optimalisasi Perpendataan Perangaran Imigran Ilegal, Pencari Suaka dan Pengungsi.	Terwujudnya koordinasi dengan Instansi terkait dalam penanganan imigran ilegal, pencari suaka dan pengungsi.	Imigran Ilegal, Pencari Suaka dan Pengungsi tertangani dengan baik dan tepat.	ID06: 1. Terbenutuknya Tim Satgas Penanggulungan dan Penanganan Imigran Ilegal, Pencari Suaka dan Pengungsi. 2. Terlaksananya koordinasi yang baik dengan instansi terkait dalam rangka penanggulungan dan	Kadivim

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
39	Pengelolaan Keluhar dan Pengaduan	Terselesaikannya keluhan dan	Setiap keluhan dan pengaduan masyarakat	<p>B06: 1. Terbitnya Surat Keputusan:</p> <p>penanganan imigran ilegal, pencari suaka dan pengungsi;</p> <p>3. Evaluasi dari laporan terkait kesiapan Tim Satgas Penanggulangan dan Penanganan Imigran ilegal, pencari Suaka dan Pengungsi.</p> <p>B09: Terlaksananya koordinasi yang baik dengan instansi terkait dalam rangka penanggulangan dan penanganan imigran ilegal, pencari suaka dan pengungsi.</p> <p>H12: 1. Terlaksananya koordinasi yang baik dengan instansi terkait dalam rangka penanganan dan penanggulangan imigran ilegal, pencari suaka dan pengungsi;</p> <p>2. Monitoring, evaluasi dan laporan.</p>	Kadivim

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PEWANGGUNG JAWAB
		peragaduar masyarakat dengan baik.			
40	Optimalisasi pengendalian pemeriksaan keimigrasian di TPI (Tempat Pemeriksaan)		Terdiselesaikan, ditanggapi dan diberikan penjelasan oleh Tim pengaduar keimigrasian dan peragaduar masyarakat.	Tentang Pembentukan Tim Pengelola Keluar dan Peragaduar Masyarakat; 2. Tersedianya sarana peragaduar keimigrasian dan peragaduar masyarakat melalui kotak saran, sms, dan jejaring sosial lainnya. 3. Pelaksanaan kegiatan penerimaan pengaduar masyarakat penyelesaian dan penyelesaian masyarakat B09: Pelaksanaan penerimaan penyelesaian pengaduar masyarakat. B12: 1. Pelaksanaan penerimaan penyelesaian peragaduar masyarakat. 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.	Kadivim
		Terwujudnya pemeriksaan keimigrasian yang optimal di TPI.		B06: 1. Terbitnya Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Optimalisasi pengendalian pemeriksaan keimigrasian di TPI.	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN		UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PEWANGGUNG JAWAB
41	Penguatan database Keayaan Intelektual Komunal (KIK)	Tersusunnya database Keayaan Intelektual Komunal (KIK)	Tersedianya database KIK antara lain Indikasi Geografis, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Kearifan Masyarakat Tradisional, dan/atau Kearifan Lokal.	<p>2. Terlaksananya kegiatan pengawasan terhadap pengendalian pemeriksaan keimigrasian di TPI.</p> <p>B09: Terlaksananya kegiatan pengawasan terhadap pengendalian pemeriksaan keimigrasian di TPI.</p> <p>B12: 1. Terlaksananya kegiatan pengawasan terhadap pengendalian pemeriksaan keimigrasian di TPI; 2. Monitoring, evaluasi dan laporan.</p>	<p>B06: 1. Tersebutnya Tim Inventarisasi KIK</p> <p>2. Terkirimnya Surat Permintaan Data KIK</p> <p>3. Pembuatan database KIK</p> <p>B-09: Pembuatan database KIK</p> <p>B12: Evaluasi dan Laporan KIK</p>	Kediv Yankum

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
42	Optimalisasi Fungsi Karwil Sebagai Pusat Layanan Hukum di Daerah	Meminimalkan fungsi karwil dalam memberikan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum	inventarisasi Prolegda, Perda, dan Daftar Buku Perpustakaan	B06: Pembentukan Tim Penguatan Fungsi Karwil Sebagai Pusat Layanan Informasi dan Dokumentasi Hukum di Daerah B09: Tersedianya Database Prolegda, Perda, dan Daftar Buku Perpustakaan B12: Evaluasi dan Laporan	Kadiv Yankum
43	Pengelolaan Data Notaris wilayah berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat memperoleh informasi mengenai jumlah dan identitas Notaris wilayah secara jelas dan dapat diakses secara online.	Tersedianya informasi mengenai jumlah dan identitas Notaris wilayah yang terbaru (ter up date)	B06: Terkirimnya surat permintaan data identitas notaris ke organisasi notaris B09: Tersedianya dan inventarisasi ryo data identitas Notaris B12: Evaluasi dan pelaporan.	Kadiv Yankum
44	Digitalisasi database sertifikat fidusia yang telah didaftarkan secara manual	Tersedianya database sertifikat fidusia berbasis teknologi	Terselenggaranya digitalisasi database sertifikat fidusia yang telah didaftarkan secara manual.	B06: Terselenggaranya inventarisasi database sertifikat fidusia	Kadiv Yankum

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PEWANGGUNG JAWAB
		inforansi.		B09: Tentukan dan penyusunan datajase sertifikat fidusia B12: Evaluasi dan laporan	
45	Fasilitas Pemberitahuan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya fasilitas pembentukan Produk Hukum Daerah	Meningkatnya jumlah Prolegda dan Terda yang diberikan pendampingan secara penuh sampai dengan diterbitkannya produk hukum daerah	B06: Terselenggaranya Koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Daerah, DPRD Provinsi, Kabupaten/ Kota. B09: 1. Terselenggaranya Kerja sama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Daerah, DPRD Provinsi, Kabupaten/ Kota. 2. Tersedianya Data Rancangan Produk Hukum Daerah. B12: Evaluasi dan Laporan	Kadiv Yankum
46	Optimalisasi Pelaksanaan RANHAM dan Kab/Kota Peduli	Terwujudnya pelaksanaan RANHAM dan	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan RANHAM dan Kab/Kota Peduli HAM	B06: Koordinasi Pelaksanaan RANHAM dan Kab/Kota	Kadiv Yankum

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
	HAM	Kab/Kota Peduli HAM		Peduli HAM; BO9 : Terlaksananya RANHAM dan Kab/ Kota Peduli HAM BO12: Evaluasi dan Laporan Tahunan RANHAM	

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TASOJINA H LAOLY